

**KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERDASARKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) TAHUN 2009-2015**

Welly dan Lis Djuniar

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Email: welly_lht@yahoo.com

Abstract: This study aims to determine performance of South Sumatra province. Conclusive type of the study described in descriptive where the variables are financial ratios and government performance. Data used are primary and secondary data which are collected by documentation and interviews. Data analyses used are qualitative and quantitative analysis. Results of the study showed the average of self-sufficiency ratio is 41,21% in low categorized where can be seen from the central government transfers funds revenue is still large, while the potential of PAD is not optimal yet. The average of effectiveness ratio is 96,31% in the effective categorized which can be seen from the realizations to the targets which has not reached 100%. The average ratio of expenditure operation activities is 64,49%, while the capital expenditures is 21,74%, operating expenditure can be seen from particular personnel, goods/services and grants are still high, which grants 2011-2015 expenditure continues increasingly. The average ratio of expenditure management is 94,23% which shows the total of expenditure does not exceed the total income which happened the budget surplus year except 2013. The ratio income and growth of PAD has been in good positive growth except in 2013. The growth of expenditure operation is still high compared to the ratio of capital expenditures growth. Thus the performance of government financial management of South Sumatra province 2009-2015 period is quite well.

Keywords: Performance, APBD, Financial Ratio.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menilai kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan rasio keuangan. Jenis penelitian konklusif yang dijelaskan secara deskriptif dengan variabel rasio keuangan dan kinerja pemerintah. Data menggunakan data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata rasio kemandirian sebesar 41,21% dikategorikan masih rendah terlihat dari pendapatan dana transfer pemerintah pusat masih besar, sedangkan potensi daerah PAD belum optimal. Rata-rata rasio efektifitas sebesar 96,31% dikategorikan efektif terlihat dari realisasi PAD terhadap target PAD belum mencapai 100%. Rata-rata rasio aktivitas belanja operasi sebesar 64,49% sedangkan belanja modal sebesar 21,74%, terlihat belanja operasi khususnya belanja pegawai, barang/jasa dan hibah masih tinggi, dimana belanja hibah tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan. Rata-rata rasio pengelolaan belanja 94,23%, menunjukkan total belanja tidak melebihi total pendapatan sehingga terjadi surplus anggaran kecuali ditahun 2013. Rasio pertumbuhan PAD dan pendapatan sudah cukup baik mengalami pertumbuhan positif kecuali tahun 2013. Pertumbuhan belanja operasi masih sangat tinggi dibandingkan belanja modal. Dengan demikian kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015 cukup baik.

Kata Kunci: Kinerja, APBD, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Perekonomian suatu Negara tidak terlepas dari dua peran organisasi yaitu organisasi sektor publik (pemerintah) dan sektor swasta. Kedua organisasi ini bahu-membahu dalam menumbuhkan dan menggerakkan perekonomian. Disini peran pemerintah sangat besar dalam mengendalikan semua sektor kehidupan masyarakat dan pihak swasta turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Dilihat dari fungsinya, pemerintah berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi dan lain-lain yang sangat tergantung pada besarnya dana yang dimiliki, semakin besar dana teralokasikan dalam belanja guna menyelenggarakan program pemerintah maka kesejahteraan masyarakat semakin baik. Tidak ada aktivitas tidak menggunakan dana begitu juga pelayanan pemerintah. Dana tersebut bersumber dari pajak, retribusi, hasil kekayaan, laba BUMN/BUMD dan lain-lain pendapatan yang sah. Pajak penyumbang terbesar dalam pendapatan pemerintah, karena semua kehidupan tidak terlepas dari pajak. Selain sumber tersebut, dana pemerintah diperoleh dari bantuan pendapatan transfer pemerintah pusat, terdiri dari pendapatan bagi hasil pajak, pendapatan bagi hasil bukan pajak, pendapatan dana alokasi umum (DAU), dan pendapatan dana alokasi khusus (DAK). Artinya pemerintah daerah selain memperoleh dan menggali potensi daerah, pemerintah daerah juga memperoleh bantuan pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mengalokasikan secara tepat pendapatan yang diperoleh kedalam pengeluaran sehingga terjadinya keseimbangan anggaran.

Anggaran merupakan suatu rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk *financial* memiliki ukuran jelas serta terdapat waktu pencapaian. Anggaran harus mencerminkan kegiatan apa yang dilaksanakan, berapa besar dana, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini tercermin dari rencana yang disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). APBD harus disahkan menjadi Perda kemudian bisarealisasikan sesuai rencana (Nordriawan, 2006; 88-95). Untuk melihat pencapaian program maka diakhir tahun anggaran pemerintah dimintai pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan bertujuan memberikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas (Standar Akuntansi Pemerintah, Nomor 71 Tahun 2010 revisi dari Nomor 25 Tahun 2005). Pemerintah provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi di pulau Sumatera yang terdiri dari empat kota dan 13 kabupaten. Dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya dibutuhkan sumber pendapatan yang nantinya digunakan untuk belanja. Gubernur Sumatera Selatan selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan aktivitas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dibantu kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Selatan. Kepala BPKAD ini bertugas dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan anggaran SKPKD. Berikut disajikan pada Tabel 1 mengenai pendapatan daerah dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

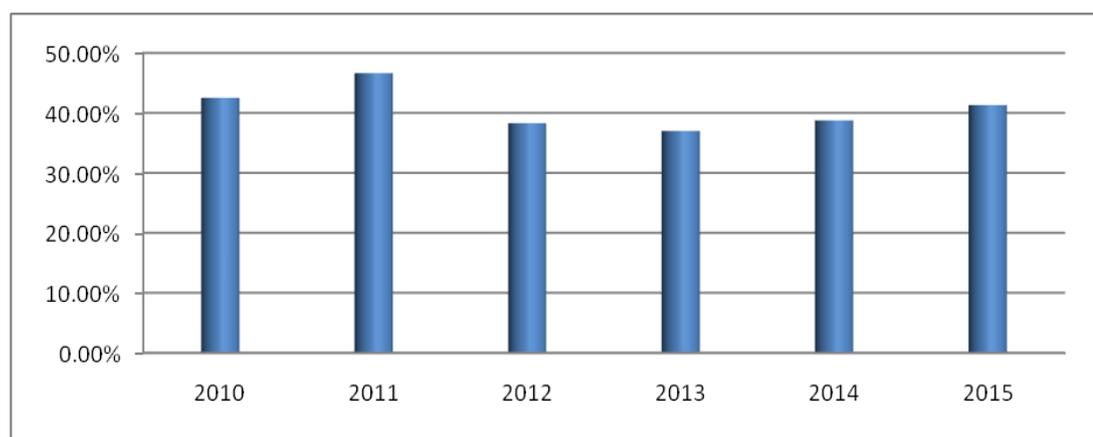
| Tahun | Pendapatan Daerah | Belanja Daerah | Surplus/Defisit |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2009 | 2.397.685.724.174 | 2.341.327.091.455 | 56.358.632.719 |
| 2010 | 3.222.588.807.133 | 3.107.701.106.210 | 114.887.700.923 |
| 2011 | 3.963.984.966.161 | 3.806.079.835.012 | 157.905.131.148 |
| 2012 | 5.233.940.074.318 | 5.060.923.743.214 | 163.016.331.104 |

| | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2013 | 5.468.139.691.033 | 5.678.703.610.531 | (210.563.919.498) |
| 2014 | 6.252.136.312.520 | 5.781.570.143.910 | 470.566.168.610 |
| 2015 | 5.889.206.929.216 | 4.495.777.508.204 | 701.119.769.609 |

Sumber : BPKD Provinsi Sumatera Selatan, 2016

Berdasarkan Tabel 1 diketahui adanya selisih pendapatan daerah dan belanja daerah yang disebut surplus atau defisit. Dikatakan surplus apabila pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah, sebaliknya jika defisit. Selama empat tahun (2009-2012) diketahui bahwa laporan realiasi anggaran provinsi Sumatera Selatan mengalami surplus bahkan semakin meningkat setiap tahunnya, tetapi hal ini tidak berlangsung lama ditahun 2013 mengalami defisit. Dimana pendapatan daerah tahun 2013 lebih kecil dari belanja daerah. Kemudian untuk tahun 2014-2015 kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan semakin baik yang sebelumnya mengalami defisit beralih normal. Hal ini menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana rasio-rasio keuangan bisa menjelaskan kondisi keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, apa faktor penyebab terjadinya defisit anggaran tahun 2013, serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan.

Alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dan membuktikan secara empiris mengenai kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan adalah analisis rasio keuangan yang terdiri dari rasio: kemandirian, efektifitas dan efisiensi, aktivitas, pengelolaan belanja dan pertumbuhan. Perhitungan rasio kemandirian bisa dijadikan dasar dalam pengambilan masalah dalam penelitian ini, karena rasio kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Halim, 2007: 232). Menurut Fidelius (2013) untuk menghitung rasio kemandirian bisa menggunakan perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan. Berikut disajikan pada Grafik 1 mengenai pertumbuhan rasio kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015:



Grafik 1: Pertumbuhan Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Berdasarkan Grafik 1 diketahui bahwa hasil perhitungan rasio kemandirian provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun dikatakan belum mandiri karena rata-rata hanya sebesar 41,21% dikategorikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah Sumatera Selatan terhadap pemerintah pusat sangat besar. Rasio kemandirian ini menggambarkan hasil rasio lainnya, semakin baik rasio kemandirian maka semakin baik pula rasio-rasio yang lainnya. Penelitian serupa telah banyak dilakukan seperti yang

dilakukan oleh Dewa dan Susanto (2010), Efendi dan Waryanti (2011), Fidelius (2013), Hafidh (2013), Sijabat dkk (2013), Pramono (2014), Santosa (2014), Tambuwun (2014), dan Mahbur dkk (2016) menyatakan bahwa ketergantungan daerah sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah semakin rendah. Pokok masalah yang diajukan dalam penelitian ini Bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2009-2015?. Sedangkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2015.

KAJIAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Menurut Mahmudi (2011: 177) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah itu sendiri bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Kinerja Keuangan. Menurut Bastian (2006: 274) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai organisasi dalam periode tertentu. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan organisasi, seluruh aktivitas organisasi harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input program, tetapi juga pada keluaran manfaat dari program tersebut. Bastian (2006: 275) menyatakan Pengukuran kinerja secara berkelanjutan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Dengan catatan pencapaian indikator kinerja organisasi diharapkan dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode waktu tertentu.

Rasio Keuangan. Menurut Halim (2012: 231-241) Analisis rasio keuangan pada anggaran dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dengan rasio daerah lain atau potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut

terhadap pemerintah daerah lainnya. Menurut Halim dan Kusufi (2012: L-5) jenis-jenis rasio keuangan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian

Menurut Halim (2012: L-5) Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah bersumber dari bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Berikut rumus untuk menghitung rasio kemandirian:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Untuk memberikan kriteria penilaian rasio kemandirian keuangan daerah disajikan pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kemandirian

| Kriteria Kemampuan Keuangan | Rasio Kemandirian (%) |
|-----------------------------|-----------------------|
| Rendah Sekali | 0% - 25% |
| Rendah | 25% - 50% |
| Sedang | 50% - 75% |
| Tinggi | 75% - 100% |

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD. Rasio efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan operasi, organisasi sektor publik bisa dikatakan efektif jika kegiatan yang dilakukan mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2012) Rasio efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD direncanakan dibandingkan dengan target ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Mahmudi (2011: 170) rasio efektifitas pendapatan menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan. Dikatakan efektif jika rasio efektifitas mencapai 100%. Berikut rumus untuk menghitung rasio efektifitas:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Menurut Halim (2012: L-6) Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektifitas perlu dipersandingkan dengan rasio

efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan penerimaan pendapatan sesuai target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatan lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterima. Berikut rumus untuk menghitung rasio efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui rasio ini setiap tahun maka dibandingkan dengan kriteria penilai yang disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektifitas dan Efisiensi

| Rasio Efektifitas | | Rasio Efisiensi | |
|----------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Kriteria Efektifitas | Efektifitas (%) | Kriteria Efisiensi | Efisiensi (%) |
| Sangat Efektif | > 100 | Tidak Efisien | >100% |
| Efektif | >90 – 100 | Kurang Efisien | 90% - 100% |
| Cukup Efektif | >80 – 90 | Cukup Efisien | 80% - 90% |
| Kurang Efektif | >60 – 80 | Efisien | 60% - 80% |
| Tidak Efektif | ≤60 | Sangat Efisien | <60% |

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327/1996

Rasio Aktivitas. Menurut Halim (2012: 235) rasio aktivitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) untuk menyediakan sarana prasarana masyarakat cenderung semakin kecil. Kemampuan daerah dikatakan baik apabila belanja pembangunan lebih besar dari belanja rutin, berikut unsur rasio keserasian:

Rasio Belanja Rutin/Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Belanja Pembangunan

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

Rasio Pengelolaan Belanja. Rasio ini menunjukkan kegiatan belanja pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima. Rasio ini menunjukkan adanya surplus/defisit anggaran.

Surplus dan defisit yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode laporan. Berikut rumus untuk menghitung rasio pengelolaan belanja:

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio pengelolaan belanja bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah berhasil mengeluarkan pendapatan yang diperoleh untuk dikeluarkan dalam bentuk belanja, sebagai perbandingan belanja pemerintah tidak lebih besar dari total penerimaan.

Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*). Menurut Halim (2012: 241) Rasio pertumbuhan mengukur berapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensimana yang perlu mendapat perhatian. Berikut rumus untuk menghitung persentase pertumbuhan:

Persentase Pertumbuhan PAD

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD tahun } p - \text{PAD Tahun } p-1}{\text{PAD Tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Total Pendapatan

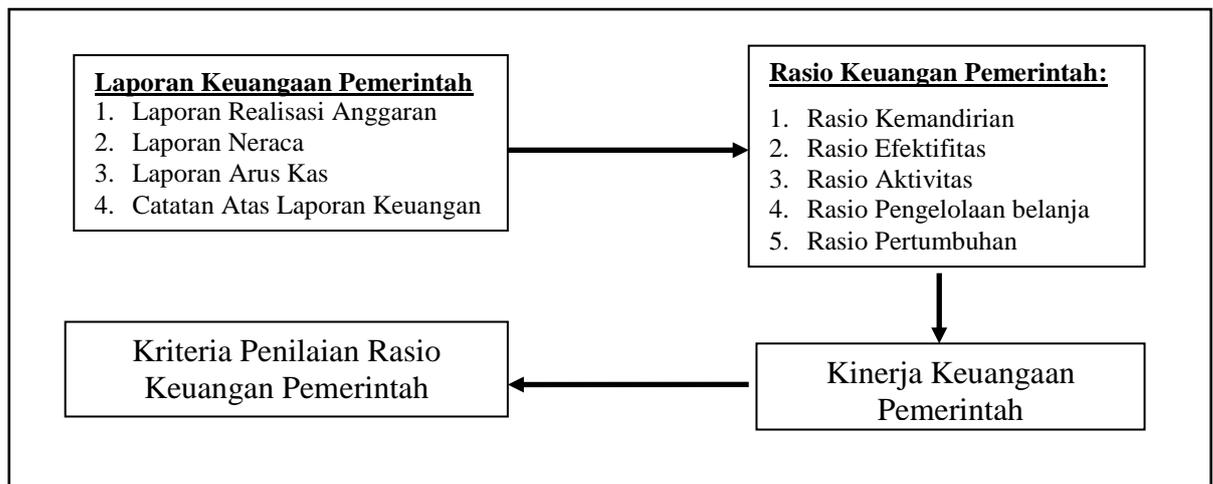
$$\text{Pertumbuhan Pendapatan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } p - \text{Pendapatan Tahun } p-1}{\text{Pendapatan Tahun } p-1} \times 100\%$$

Persentase Pertumbuhan Belanja

$$\text{Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Belanja Tahun } p - \text{Belanja Tahun } p-1}{\text{Belanja Tahun } p-1} \times 100\%$$

Kerangka Pemikiran. Penelitian mengenai rasio keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan seperti yang dilakukan Santosa (2013) berjudul analisis kinerja keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil Penelitian Santosa menunjukkan rasio efektifitas PAD mengalami peningkatan walaupun tidak berjalan efektif, untuk rasio kemandirian masih rendah. Sedangkan untuk analisis pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan walupun tidak signifikan. Penelitian Tambuwun (2014) berjudul analisis kinerja keuangan kota Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio derajat desentralisasi kinerja keuangan masih kurang, rasio ketergantungan keuangan daerah masih tinggi, tingkat kemandirian masih kurang diukur dengan rasio kemandirian. Rasio efektifitas realisasi penerimaan PAD cukup efektif, efisiensi belanja dikategorikan baik diukur dengan rasio efisiensi belanja. Penelitian Pauwah (2014) berjudul analisis kinerja keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian, efektifitas, aktifitas, pengelolaan belanja, dan pertumbuhan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. Analisis rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan dapat dikategorikan cukup baik.

Beberapa hasil penelitian mengenai rasio keuangan terhadap kinerja pemerintah telah dilakukan Azhar (2008), Dewa dan Susanto (2010), Efendi dan Wuryanti (2011), Hafidh (2013), Fidelius (2013), Agustina (2013), Santosa (2013), Pramono (2014), Muhibtari(2014), Pauwah (2014), Tambuwun (2014), Mahbur dkk (2016), Sijabat dkk (2016), Borolayuk dkk (2016), dan Wahyuni (2016), memberikan kesimpulan beragam terutama dalam rasio kemandirian hal ini dikarenakan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat berbeda, serta karakteristik pemerintah berbeda terutama dari sumber PAD. Pada dasarnya penelitian yang dilakukan hampir sama dengan penelitian sebelumnya, sama-sama menggunakan rasio keuangan untuk mengukur kinerja. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka dibuatlah kerangka pemikiran yang terlihat pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

METODE

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif (Sugiyono, 2013: 53-55) yang digunakan untuk mengetahui, menghitung dan menganalisis rasio keuangan yang terdapat dalam APBD dengan menggunakan rasiokemandirian, efektifitas, aktivitas, pengelolaan belanja dan pertumbuhan kemudian menghubungkan rasio tersebut untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Variabel penelitian yang digunakan yaitu kinerja keuangan pemerintah. Menurut Indiantoro dan Supomo (2009: 146-147) data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sugiyono (2013: 402-425) terdapat empat teknik pengumpulan data yaitu interview, kuesioner, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian pokok, pertama menganalisis rasio keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas yang terdiri dari aktivitas operasi dan aktivitas pembangunan, rasio pengelolaan belanja dan rasio pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan PAD, pertumbuhan belanja operasi, dan

pertumbuhan belanja pembangunan. Kedua menganalisis kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan, yang diuraikan sebagai berikut:

Analisis Rasio Keuangan Pemrintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Rasio Kemandirian. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan. Berikut disajikan pada Tabel 4 yang menjelaskan perhitungan rasio kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2015:

Tabel 4. Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Tahun | Total PAD | Total Pendapatan | Rasio Kemandirian | Kriteria Penilaian |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2009 | 1,054,332,693,090 | 2,397,685,724,174 | 43.97% | Rendah |
| 2010 | 1,369,935,856,700 | 3,222,588,807,133 | 42.51% | Rendah |
| 2011 | 1,849,119,912,016 | 3,963,984,966,161 | 46.65% | Rendah |
| 2012 | 2,001,714,583,551 | 5,223,940,074,318 | 38.32% | Rendah |
| 2013 | 2,021,696,787,275 | 5,468,139,691,033 | 36.97% | Rendah |
| 2014 | 2,422,673,788,768 | 6,252,136,312,519 | 38.75% | Rendah |
| 2015 | 2,433,309,280,020 | 5,889,206,929,216 | 41.32% | Rendah |
| Rasio Kemandirian Rata-rata | | | 41.21% | Rendah |

Berdasarkan Tabel 4 diketahui rata-rata rasio kemandirian periode 2009-2015 sebesar 41,21%, ini menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki kemandirian yang rendah dalam menyelenggarakan aktivitas pemerintahan. Dimana penerimaan provinsi Sumatera Selatan sebagian besar 58,02% bersumber dari dana transfer pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Sedangkan penerimaan berasal dari pontensi daerah berupa pajak dan retribusi masih belum optimal hanya sebesar 41,21%. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih bisa mengoptimalkan sumber PAD yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan lain-lain PAD yang sah sehingga dapat murunkan ketergantungan kepada pemerintah pusat. Hasil analisis rasio kemandirian pemerintah provinsi Sumatera Selatan ini sama seperti hasil penelitian Dewa dan Susanto (2010), Efendi dan Wuryanti (2011), Fidelius (2013), Hafidh (2013), Sijabat dkk (2013), Pramono (2014), Santosa (2014), Tambuwun (2014), dan Mahbur dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa ketergantungan daerah masih sangat tinggi terhadap pemerintah pusat sehingga tingkat kemandirian daerah semakin rendah.

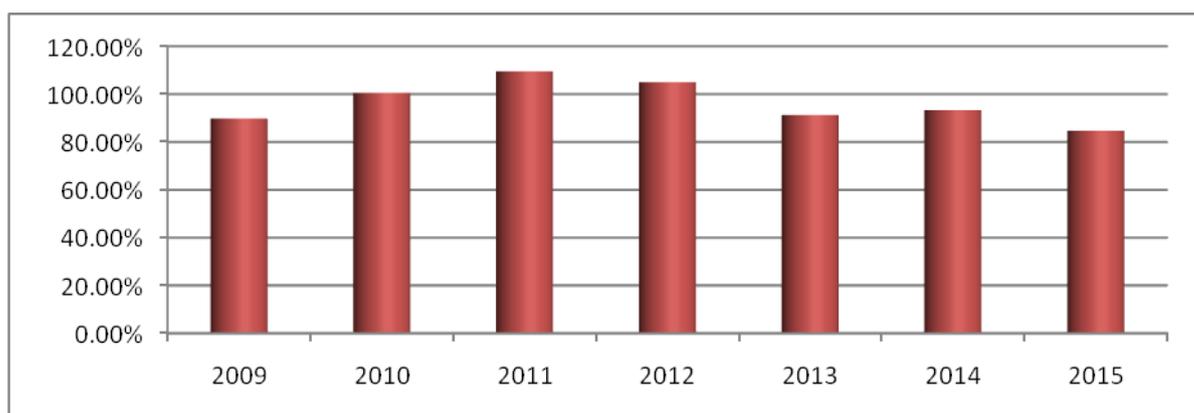
Rasio Efektifitas. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai 100%. Semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun semakin baik. Untuk mendapatkan nilai rasio efektifitas adalah membandingkan realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target penerimaan PAD, kemudian hasil rasio dibandingkan kriteria yang ditetapkan. Berikut disajikan pada Tabel 5 mengenai perhitungan rasio efektifitas pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015:

Berdasarkan Tabel 5 diatas diketahui bahwa setiap tahun target yang ditetapkan telah terealisasi diatas 84%, hal ini menunjukkan efektifnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai PAD. Tetapi tidak bisa dipungkuri bahwa seharusnya potensi PAD provinsi Sumatera Selatan harus digali lagi untuk meningkatkan penerimaan. Berikut

disajikan pada Grafik 2 mengenai pertumbuhan rasio efektifitas Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015:

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efektifitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah | | Rasio Efektifitas | Kriteria Penilaian |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Target | Realisasi | | |
| 2009 | 1,173,768,283,800 | 1,054,332,693,090 | 89.82 | Cukup Efektif |
| 2010 | 1,363,164,448,550 | 1,369,935,856,700 | 100.50 | Sangat Efektif |
| 2011 | 1,687,295,615,400 | 1,849,119,912,016 | 109.59 | Sangat Efektif |
| 2012 | 1,907,709,081,676 | 2,001,714,583,551 | 104.93 | Sangat Efektif |
| 2013 | 2,214,420,245,000 | 2,021,696,787,275 | 91.30 | Efektif |
| 2014 | 2,595,724,088,303 | 2,422,673,788,768 | 93.33 | Efektif |
| 2015 | 2,871,976,896,280 | 2,433,309,280,020 | 84.73 | Cukup Efektif |
| Rata-rata Rasio Efektifitas | | | 96,31% | Efektif |



Grafik 2: Pertumbuhan Rasio Efektifitas Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Berdasarkan Grafik 2 diketahui bahwa rata-rata rasio efektifitas keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2015 sebesar 96,31% dikategorikan efektif, ini berarti bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah efektif dalam melakukan pengelolaan keuangan. Dimana realisasi PAD hampir mencapai target 100%. Diawal tahun 2009-2011 rasio efektifitas mengalami pertumbuhan yang sangat baik bahkan mengalami peningkatan, tetapi diawal tahun 2012-2015 rasio ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan target PAD yang ditetapkan Provinsi Sumatera Selatan terlalu tinggi sehingga tidak tercapai. Walaupun demikian tingkat pencapaiannya cukup baik diatas 85% hampir mendekati 100%. Hasil penelitian rasio efektifitas keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan adalah efektif sejalan dengan hasil penelitian Pramono (2014) dan Mahbur dkk (2016). Sedangkan hasil penelitian Dewa dan Susanto(2010) yang menyimpulkan efektifitas pengelolaan keuangan sangat efektif dikarenakan pertumbuhan PAD yang cukup tinggi. Fidelius (2013), Hafidh (2013), dan Tambuwun (2014) menyatakan kinerja keuangan cukup efektif.

Rasio Aktivitas. Rasio aktivitas menggambarkan bagaimana Provinsi Sumatera Selatan memprioritaskan alokasi dana pada belanja operasi dan modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase untuk belanja pembangunan dalam menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin rendah. Berikut disajikan pada Tabel 6 mengenai perhitungan rasio aktivitas operasi:

Tabel 6. Perhitungan Rasio Aktivitas Operasi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Tahun | Belanja Rutin | Total APBD | Rasio Aktivitas Operasi (%) |
|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| 2009 | 1,323,028,773,181 | 2,397,685,724,174 | 55.18 |
| 2010 | 1,596,059,303,821 | 3,222,588,807,133 | 49.53 |
| 2011 | 2,292,876,160,804 | 3,963,984,966,161 | 57.84 |
| 2012 | 3,542,779,462,688 | 5,223,940,074,318 | 67.82 |
| 2013 | 4,699,990,031,504 | 5,468,139,691,033 | 85.95 |
| 2014 | 4,778,821,100,969 | 6,252,136,312,519 | 76.44 |
| 2015 | 3,453,717,577,435 | 5,889,206,929,216 | 58.64 |

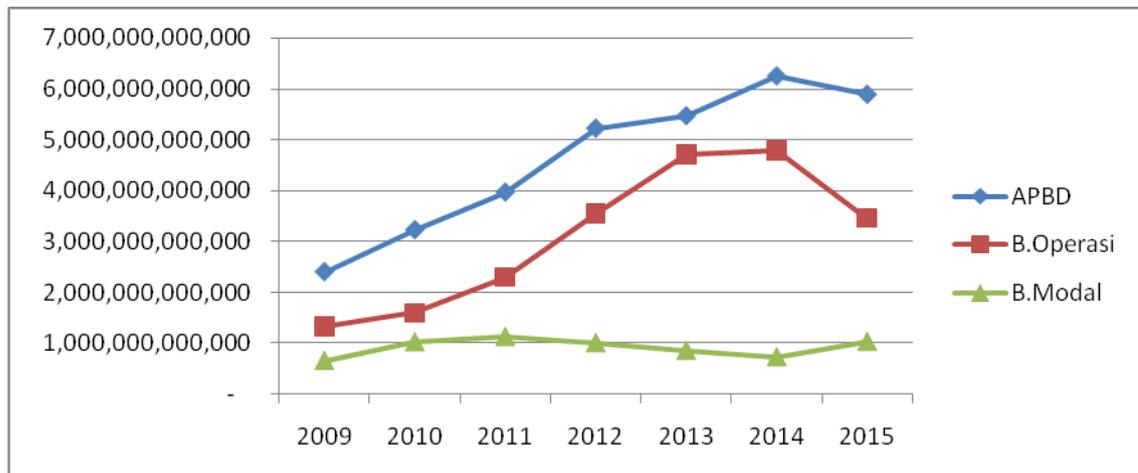
Berdasarkan Tabel 6 diketahui rasio aktivitas operasi/rutin Provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015 menunjukkan sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Pengeluaran terbesar belanja operasi terjadi ditahun 2013-2015 yang dipergunakan untuk belanja hibah. Rata-rata rasio aktivitas belanja operasi selama tujuh tahun adalah 64,49%, tergolong tinggi hampir 50% pengeluaran diperuntukan untuk belanja operasi bukan belanja pembangunan. Sebaiknya pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih bisa menekan belanja operasi dan meningkatkan belanja pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Berikut disajikan pada Tabel 7 mengenai perhitungan rasio aktivitas pembangunan/modal:

Tabel 7. Perhitungan Rasio Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Tahun | Belanja Modal | APBD | Rasio Aktivitas Modal (%) |
|-------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| 2009 | 660,664,241,233 | 2,397,685,724,174 | 27.55 |
| 2010 | 1,032,890,015,887 | 3,222,588,807,133 | 32.05 |
| 2011 | 1,139,120,156,279 | 3,963,984,966,161 | 28.74 |
| 2012 | 1,017,181,536,526 | 5,223,940,074,318 | 19.47 |
| 2013 | 862,903,668,426 | 5,468,139,691,033 | 15.78 |
| 2014 | 733,382,314,935 | 6,252,136,312,519 | 11.73 |
| 2015 | 1,041,021,930,768 | 5,889,206,929,216 | 17.68 |

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa rasio aktivitas belanja modal tahun 2011-2014 mengalami penurunan sedangkan 2015 mengalami peningkatan mencapai 17,68%. Pengeluaran provinsi Sumatera Selatan untuk belanja modal sangat kecil bahkan mengalami penurunan setiap tahunnya. Jika alokasi belanja modal tinggi dapat

meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seharusnya provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi yang sedang berkembang sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti pembangunan jalan, irigasi dan jaringan untuk memperlancar proses distribusi barang/jasa. Berikut disajikan pada Grafik 3 perbandingan antara APBD, belanja operasi dan belanja modal provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun (2009-2015):



Grafik 3: Perbandingan APBD, Belanja Operasi, Belanja Modal Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Berdasarkan Grafik 3 menunjukkan hasil perhitungan rasio aktivitas berupa rasio belanja modal tahun 2009 diperoleh nilai sebesar 26,72%. Pengeluaran untuk belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap dan asset lainnya. Pengeluaran paling dominan digunakan untuk melakukan pembangunan dibidang pembuatan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 56,80% dari total belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan ditahun 2009 berupaya melakukan perbaikan jalan, irigasi dan jaringan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pembangunan gedung dan bangunan hanya 17,43%, artinya ditahun 2009 pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak melakukan investasi dalam pembuatan gedung dan bangunan.

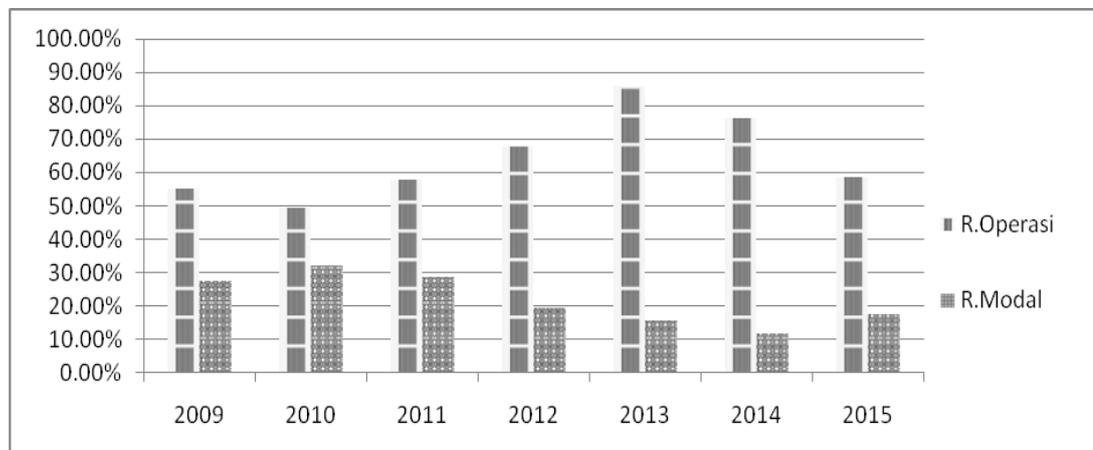
Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas berupa rasio belanja pembangunan/modal tahun 2013 diperoleh nilai sebesar 15,78%. Pengeluaran untuk belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap dan asset lainnya. Pengeluaran yang paling besar digunakan untuk melakukan pembangunan dibidang pembuatan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 68,44% dari total belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan ditahun 2013 berupaya melakukan perbaikan jalan, irigasi dan jaringan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pembangunan gedung dan bangunan turun ke 15,38% yang sebelumnya sebesar 17,13%, artinya ditahun 2013 pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengurangi pengeluaran untuk melakukan investasi dalam pembuatan gedung dan bangunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio aktivitas berupa rasio belanja pembangunan/modal tahun 2014 diperoleh nilai sebesar 11,73%. Pengeluaran untuk

belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap dan asset lainnya. Pengeluaran yang paling besar digunakan untuk melakukan pembangunan dibidang pembuatan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 68,57% dari total belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan ditahun 2014 berupa melakukan perbaikan jalan, irigasi dan jaringan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pembangunan gedung dan bangunan turun ke 10,73% yang sebelumnya sebesar 15,38%, artinya ditahun 2014 pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengurangi pengeluaran untuk melakukan investasi dalam pembuatan gedung dan bangunan.

Berdasarkan hasil rasio belanja pembangunan/modal tahun 2015 diperoleh nilai sebesar 17,68%. Pengeluaran untuk belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembelian tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, asset tetap dan asset lainnya. Pengeluaran yang paling besar digunakan untuk melakukan pembangunan dibidang pembuatan jalan, irigasi dan jaringan sebesar 26,53% dari total belanja pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan ditahun 2015 berupa melakukan perbaikan jalan, irigasi dan jaringan untuk masyarakat Sumatera Selatan. Sedangkan untuk pembangunan gedung dan bangunan naik ke 22,27% yang sebelumnya sebesar 10,73%, artinya ditahun 2015 pemerintah provinsi Sumatera Selatan mengurangi pengeluaran untuk melakukan investasi dalam pembuatan gedung dan bangunan.

Berikut disajikan pada Grafik 4 mengenai perbandingan rasio aktivitas operasi dan modal provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015:



Grafik 4: Perbandingan Rasio Operasi dan Rasio Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Berdasarkan Grafik 4 diketahui bahwa rasio operasi memiliki porsi lebih besar dari rasio pembangunan. Ini membuktikan bahwa provinsi Sumatera Selatan tahun 2009-2015 lebih berfokus pada pengeluaran untuk belanja operasi (belanja pegawai, bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan sosial keuangan), sedangkan untuk aktivitas pembangunan sangat kecil. Seharusnya provinsi Sumatera Selatan lebih berfokus pada aktivitas pembangunan atau modal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian David dan Sri (2011), Fidelius (2013), Sijabat dkk (2013), yang menyatakan bahwa alokasi untuk belanja operasi lebih besar dari belanja

modal, padahal menurut Halim (2012) apabila pengeluaran belanja modal lebih tinggi maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rasio Pengelolaan Belanja. Rasio ini menunjukkan kegiatan belanja pemerintah daerah memiliki equitas antara periode yang positif, yaitu belanja yang dilakukan tidak lebih besar dari total pendapatan yang diterima. Rasio ini menunjukkan adanya surplus dan defisit anggaran. Berikut disajikan pada Tabel 8 mengenai perhitungan rasio pengelolaan belanja:

Tabel 8. Perhitungan Rasio Pengelolaan Belanja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Tahun | Total Pendapatan | Total Belanja | Surplus/Defisit | Rasio Pengelolan Belanja (%) |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 2009/2010 | 2,397,685,724,174 | 2,341,327,091,455 | 56,358,632,719 | 97.65 |
| 2010/2011 | 3,222,588,807,133 | 3,107,701,106,210 | 114,887,700,923 | 96.43 |
| 2011/2012 | 3,963,984,966,161 | 3,806,079,835,012 | 157,905,131,149 | 96.02 |
| 2012/2013 | 5,223,940,074,318 | 5,060,923,743,214 | 163,016,331,104 | 96.88 |
| 2013/2014 | 5,468,139,691,033 | 5,678,703,610,531 | (210,563,919,498) | 103.85 |
| 2014/2015 | 6,252,136,312,519 | 5,781,570,143,910 | 470,566,168,609 | 92.47 |
| 2015/2016 | 5,889,206,929,216 | 4,495,777,508,204 | 1,393,429,421,012 | 76.34 |
| Rata-rata Rasio Pengelolan Belanja | | | | 94.23 |

Berdasarkan Tabel 8 mengenai rasio pengelolaan belanja untuk tahun 2013 mengalami peningkatan. Hasil perhitungan rasio pengelolaan belanja diperoleh hasil 103,85%. Ini membuktikan belanja pemerintah provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari belanja operasi dan modal di tahun 2013 melebihi pendapatan yang diterima, sehingga terjadi defisit anggaran. Artinya provinsi Sumatera Selatan ditahun 2013 dikategorikan pengelolaan belanja yang kurang baik karena belanja melebihi pendapatan. Untuk tahun 2014 dan 2015 sama seperti tahun 2010-2012. Berdasarkan hasil analisis perbandingan antara total pendapatan, total belanja dan total surplus/defisit tahun 2009-2015 menunjukkan pengelolaan belanja yang baik. Hal ini terlihat total pengeluaran untuk belanja rutin dan belanja pembangunan selama tujuh tahun tidak melebihi total pendapatan yang diperoleh dari hasil PAD dan dana transfer bahkan mengalami surplus anggaran hanya saja terjadi defisit anggaran ditahun 2013. Secara keseluruhan bahwa pengelolaan belanja pemerintah provinsi Sumatera Selatan bisa dikatakan baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fidelius (2013) yang menyatakan bahwa belanja operasi lebih dominan dari belanja modal tetapi tidak melebihi pendapatan yang ada.

Rasio Pertumbuhan. Rasio pertumbuhan mengukur berapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensimana yang perlu mendapat perhatian. Berikut disajikan pada Tabel 9 mengenai perhitungan rasio pertumbuhan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun (2009-2015):

Tabel 9. Perhitungan Rasio Pertumbuhan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 – 2015

| Tahun | PAD | Total Pendapatan | Belanja Operasi | Belanja Modal |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2009/2010 | 1,054,332,693,090 | 2,397,685,724,174 | 1,323,028,773,181 | 660,664,241,233 |
| Rasio | - | - | - | - |
| 2010/2011 | 1,369,935,856,700 | 3,222,588,807,133 | 1,596,059,303,821 | 1,032,890,015,887 |
| Rasio | 29.93% | 34.40% | 20.64% | 56.34% |
| 2011/2012 | 1,849,119,912,016 | 3,963,984,966,161 | 2,292,876,160,804 | 1,139,120,156,279 |
| Rasio | 34.98% | 23.01% | 43.66% | 10.28% |
| 2012/2013 | 2,001,714,583,551 | 5,223,940,074,318 | 3,542,779,462,688 | 1,017,181,536,526 |
| Rasio | 8.25% | 31.79% | 54.51% | -10.70% |
| 2013/2014 | 2,021,696,787,275 | 5,468,139,691,033 | 4,699,990,031,504 | 862,903,668,426 |
| Rasio | 0.01 | 0.05 | 0.33 | (0.15) |
| 2014/2015 | 2,422,673,788,768 | 6,252,136,312,519 | 4,778,821,100,969 | 733,382,314,935 |
| Rasio | 0.20 | 0.14 | 0.02 | (0.15) |
| 2015/2016 | 2,433,309,280,020 | 5,889,206,929,216 | 3,453,717,577,435 | 1,041,021,930,768 |
| Rasio | 0.004 | (0.06) | (0.28) | 0.42 |

Berdasarkan Tabel 9 diketahui tahun 2010-2011 rasio pertumbuhan mengalami peningkatan, tetapi ditahun 2012-2015 pertumbuhan mengalami penurunan cukup drastis hingga mencapai pertumbuhan hanya 0,004% ditahun 2015. Untuk rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan selama periode 2009-2015 hingga mencapai pertumbuhan 0,06%. Untuk rasio belanja operasi tahun 2009-2015 mengalami penurunan termasuk rasio belanja pembangunan. Rasio pertumbuhan pendapatan provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2015 berfluktuasi. Tahun 2010-2011 mengalami penurunan cukup besar yaitu 11%, kemudian tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 8%. Tetapi ditahun 2013-2015 mengalami penurunan, bahkan 2015 mengalami penurunan mencapai negatif 0,06%. Rasio pertumbuhan belanja operasi provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2012 cukup tinggi dan mengalami peningkatan cukup besar, yaitu 20,64%, 43,66% dan 54,51%. Meningkatnya pertumbuhan belanja operasi ini dipicu pengeluaran untuk belanja hibah. Sedangkan untuk tahun 2013 mengalami penurunan yang cukup drastis atau bisa dikatakan bahwa pengeluaran belanja operasi tahun 2012 hampir sama dengan 2013. Untuk 2015 pengeluaran belanja operasi mengalami penurunan dimana tahun 2014 sebesar Rp 4.778.821.100.969 sedangkan tahun 2015 sebesar Rp. 3.453.717.577.435. Rasio pertumbuhan belanja modal provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2015 disimpulkan tidak cukup baik, dimana tahun 2009 -2015 mengalami penurunan mulai 56,34%, 10,28%, -10,70%, -0,15%, -0,15% dan 0,42%. Ini menyatakan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak mengalokasikan dana yang besar untuk pengeluaran belanja modal. Padahal belanja modal merupakan pengeluaran diperuntukkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fidelius (2013) yang menyatakan bahwa pertumbuhan belanja operasi masih sangat tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja modal.

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan provinsi Sumatera Selatan selama periode 2009-2015 dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio aktivitas, rasio pengelolaan belanja dan rasio pertumbuhan, serta dihubungkan dengan kriteria penilaian untuk lebih jelas terlihat pada Tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009-2015

| Keterangan | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Rata-Rata |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|
| | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Rasio Kemandirian | 43.97 | 42.51 | 46.65 | 38.32 | 36.97 | 38.75 | 41.32 | 41.21 |
| Rasio Efektifitas | 89.82 | 100.50 | 109.59 | 104.93 | 91.30 | 93.33 | 84.73 | 96.31 |
| Rasio Aktivitas: | | | | | | | | |
| - Belanja Operasi | 55.18 | 49.53 | 57.84 | 67.82 | 85.95 | 76.44 | 58.64 | 64.49 |
| - Belanja Modal | 27.55 | 32.05 | 28.74 | 19.47 | 15.78 | 11.73 | 17.68 | 21.86 |
| Rasio Pengelolaan Belanja | 97.65 | 96.43 | 96.02 | 96.88 | 103.85 | 92.47 | 76.34 | 94.23 |
| Rasio Pertumbuhan: | | | | | | | | |
| -PAD | - | 29.93% | 34.98% | 8.25% | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.13 |
| - Pendapatan Daerah | - | 34.40% | 23.01% | 31.79% | 0.05 | 0.14 | (0.06) | 0.15 |
| -Belanja Operasi | - | 20.64% | 43.66% | 54.51% | 0.33 | 0.02 | (0.28) | 0.18 |
| - Belanja Modal | - | 56.34% | 10.28% | -10.70% | (0.15) | (0.15) | 0.42 | 0.10 |

Berdasarkan Tabel 10 dapat dijelaskan bahwa rasio kemandirian provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun rata-rata 41,21% dapat dikategorikan rendah (25%-50%). Ini berarti bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan pada APBD provinsi Sumatera Selatan masih rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah masih memiliki ketergantungan cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dilihat dari besarnya pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan ketergantungan pemerintah provinsi Sumatera Selatan pada pemerintah pusat masih sangat tinggi dalam mencukupi kebutuhan untuk pengeluaran operasi maupun belanja pembangunan, yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan pelayanan sosial.

Jika dilihat dari perkembangan rasio kemandirian provinsi Sumatera Selatan mulai tahun 2009-2015 mengalami fluktuasi berada dikategori rendah. Rasio kemandirian sempat turun ditahun 2012 mencapai 38,32% tetapi terus meningkat ditahun 2013-2015. Adapun upaya yang telah ditempuh pemerintah provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan unsur penerimaan adalah dengan meningkatkan sumber PAD, ini terbukti dari rata-rata selama tujuh tahun 2009-2015 unsur yang memberikan kontribusi terbesar adalah pajak daerah 90,50%, lain-lain PAD yang sah, kekayaan alam dan retribusi daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun anggaran rata-rata sebesar 96,31% dapat dikategorikan efektif (90%-100%). Ini berarti bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target PAD provinsi Sumatera Selatan yang dituangkan pada APBD hampir mencapai target. Rasio efektifitas memperlihatkan adanya peningkatan rasio efektifitas yang semakin baik mulai tahun 2009-2011, tetapi ditahun 2012-2015 mengalami penurunan secara terus menerus hal ini dikarenakan target yang ditetapkan provinsi Sumatera Selatan kurang realistis, ditahun 2012 tingkat pencapaian menurun dari 109,59% ke 104,93% tetapi ditahun 2013- 2015 pemerintah provinsi Sumatera Selatan tetap meningkatkan target PAD. Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam merealisasikan PAD bersumber dari pajak, retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagai sumber pendapatan dianggap sudah baik tetapi walaupun penentuan target untuk tahun 2013-2015 tidak tercapai.

Berdasarkan rasio aktivitas yang terdiri dari rasio belanja operasi dan rasio belanja pembangunan/modal provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun (2009-2015) diketahui bahwa rata-rata rasio aktivitas belanja operasi sebesar 64,49% lebih besar dari rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan 21,86%. Rasio aktivitas belanja operasi provinsi Sumatera Selatan sangat tinggi dibandingkan rasio aktivitas belanja modal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama tujuh tahun (2009-2015) pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih memprioritaskan pengeluarannya untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial serta belanja bantuan keuangan. Untuk tahun 2009-2012 pengeluaran untuk aktivitas belanja operasi terbesar diperuntukkan untuk belanja pegawai, tetapi untuk tahun 2013-2015 pengeluaran lebih difokuskan kepada belanja hibah dengan persentase yang selalu meningkat. Semakin tinggi pengeluaran yang dialokasikan untuk belanja aktivitas operasi maka semakin kecil pengeluaran untuk aktivitas pembangunan yang berupa pembelian tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan yang semuanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena pengeluaran ditahun 2013-2015 lebih besar dialokasikan kepada belanja hibah, untuk tahun anggaran berikutnya seharusnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih bisa menekan pengeluaran untuk belanja tersebut.

Berdasarkan rasio pengelolaan belanja provinsi Sumatera Selatan diketahui rata-rata rasio selama tujuh tahun (2009-2015) sebesar 94,23%, terhitung sangat baik karena total belanja pemerintah provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun tidak melebihi total pendapatan yang diterima. Walaupun ditahun 2013 mengalami defisit anggaran, dimana belanja lebih besar dari pendapatan dengan rasio pengelolaan belanja dibawah 100% sebesar 96,29%. Untuk tahun 2015, pemerintah provinsi Sumatera Selatan berhasil menekan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga terjadi surplus cukup besar dengan tingkat rasio pengelolaan belanja sebesar 130,99%.

Berdasarkan hasil perhitungan untuk rasio pertumbuhan PAD selama tujuh tahun (2009-2015) diketahui mengalami pertumbuhan positif tetapi tidak begitu besar, kecuali untuk tahun 2011 mencapai 34,98%, kemudian untuk tahun 2012-2015 mengalami penurunan cukup drastis dengan rata-rata pertumbuhan selama tujuh tahun hanya sebesar 15,42%. Begitu juga dengan rasio pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal juga mengalami penurunan. Untuk pertumbuhan belanja operasi ditahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif, sedangkan untuk pertumbuhan modal selama tiga tahun berturut-turut (2012-2014) mengalami penurunan negatif. Sewajarnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih meningkatkan pertumbuhan belanja pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk diperuntukkan belanja operasi. Secara rata-rata pertumbuhan belanja operasi cenderung lebih besar dari belanja modal. Ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan tidak begitu baik.

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tujuh tahun (2009-2015) dibawah 40%, jika dirata-ratakan sebesar 41% dapat dikategorikan rendah. Hal ini memberikan arti bahwa kontribusi PAD Provinsi Sumatera Selatan berupa pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan alam dan lain-lain PAD terhadap pendapatan pada APBD masih kecil. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Pusat masih sangat dominan terlihat dari persentase bantuan/dana transfer dari

pemerintah pusat masih tinggi khususnya transfer pemerintah pusat yang bersumber dari bagi hasil bukan pajak yang hampir meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa rasio kemandirian pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (2009-2015) setiap tahunnya semakin menurun, ini berarti bahwa kemandirian pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat masih sangat rendah.

Rasio efektifitas pemerintah provinsi Sumatera Selatan menunjukkan persentase diatas 80%. Peningkatan terbesar terjadi ditahun 2011 mencapai angka 109,59%. Sedangkan jika dirata-rata selama tujuh tahun sebesar 96,31% dikategorikan efektif, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera selatan berhasil dalam meningkatkan realisasi PAD melebihi target anggaran. Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilihat dari rasio efektifitas sudah baik. Berdasarkan perhitungan mengenai rasio aktivitas belanja operasi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terlihat adanya peningkatan setiap tahun mulai tahun 2009-2012, mencapai rasio tertinggi ditahun 2013 sebesar 89,95%. Jika dirata-rata selama tujuh tahun maka rasio aktivitas operasi sebesar 64,49%, sedangkan rasio belanja modal sebesar 21,86%. Jika dibandingkan antara rasio belanja rutin dan belanja modal memiliki ketimpangan yang cukup besar, dimana porsi untuk belanja operasi jauh lebih besar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan selama tujuh tahun (2009-2015) dikategorikan rendah dan lebih memprioritaskan pengeluaran untuk operasi daripada pembangunan. Bila dihubungkan maka apabila pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih fokus kepada pengeluaran belanja operasi, maka pengeluaran untuk belanja pembangunan/modal untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat, pelayanan masyarakat cenderung semakin kecil. Seharusnya pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih menekan pengeluaran untuk belanja operasi seperti belanja pegawai (2011), belanja barang/jasa, belanja hibah dan belanja bantuan keuangan (2012-2015) yang mengalami peningkatan yang signifikan untuk dapat dialihkan kepada belanja pembangunan/modal.

Berdasarkan perhitungan mengenai rasio pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terlihat bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah baik dalam melakukan pengelolaan belanja. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa total belanja pemerintah provinsi Sumatera selatan tidak melebihi total pendapatan yang ada, sehingga selama tujuh tahun mengalami surplus kecuali ditahun 2013 mengalami defisit dimana rasio pengelolaan belanja menembus angka 103,85%. Jika dirata-rata selama tujuh tahun diperoleh rasio pengelolaan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebesar 94,23% bisa dikatakan baik karena tidak melebihi 100%. Sebaiknya untuk menekan rasio pengelolaan belanja adalah pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih giat dan lebih fokus untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi pengeluaran untuk belanja operasi khususnya untuk belanja hibah dan belanja bantuan keuangan.

Berdasarkan Tabel 10 diketahui rasio pertumbuhan PAD Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu tujuh tahun (2009-2015) menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan tahun 2011 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik (34,98%), tetapi untuk tahun 2012-2015 pertumbuhan mengalami penurunan dan terus menerus menurun hingga tahun 2015. Walaupun demikian pertumbuhan PAD bernilai positif, ini artinya pemerintah provinsi Sumatera Selatan telah berhasil untuk mempertahankan pencapaian realisasi PAD setiap tahunnya. Rasio pertumbuhan pendapatan Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan kurun waktu enam tahun (2009-2014) bernilai positif kecuali untuk tahun 2015 bernilai negatif. Hal ini dikarenakan total pendapatan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,06% dibandingkan 2014. Secara keseluruhan pertumbuhan pendapatan provinsi Sumatera Selatan sudah baik dan mengalami peningkatan setiap tahunnya (2009-2014) dan penurunan penerimaan pendapatan ditahun 2015.

Berdasarkan Tabel 10 diketahui bahwa rasio pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selama tiga tahun (2009-2012) mengalami peningkatan secara terus menerus dan mencapai puncak tertinggi ditahun 2013 sebesar 54,51%, terbukti pengeluaran yang dominan adalah pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja hibah (2012), dan belanja barang/jasa dan belanja hibah (2013). Sedangkan pertumbuhan di 2013-2015 mengalami penurunan (negatif). Hal ini menunjukkan pendapatan pemerintah Provinsi Sumatera selatan hampir 64,49% dipergunakan untuk membiayai pengeluaran operasi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan keuangan. Sedangkan untuk pertumbuhan belanja modal provinsi Sumatera Selatan cenderung mengalami penurunan bahkan negatif (2013-2014). Jika dirata-rata maka pertumbuhan belanja pembangunan untuk tujuh tahun (2009-2015) sebesar 21,86%, merupakan rasio yang berbanding terbalik dengan rasio aktivitas. Pengeluaran untuk belanja pembangunan lebih difokuskan untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang mendapatkan porsi paling besar diatas 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja aktivitas operasi lebih besar dari pertumbuhan belanja pembangunan/modal.

PENUTUP

Simpulan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio kemandirian sebesar 41,21% dikategorikan rendah dimana kontribusi PAD terhadap pendapatan masih rendah serta pendapatan transfer masih sangat besar. (2) Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio efektifitas rata-rata 96,31% dikategorikan efektif yang berarti bahwa realisasi PAD terhadap target PAD hampir mencapai 100%. (3) Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio aktivitas belanja operasi rata-rata sebesar 64,49%, sedangkan aktivitas pembangunan/modal sebesar 21,74%. Ini berarti bahwa pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih memprioritaskan pengeluaran untuk belanja operasi khususnya untuk belanja pegawai, barang/jasa dan belanja hibah, sedangkan pengeluaran untuk belanja pembangunan masih sangat rendah. (4) Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio pengelolaan belanja rata-rata sebesar 94,23%. Ini berarti bahwa kinerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan sudah baik, dimana belanja tidak melebihi pendapatan sehingga tidak terjadi defisit kecuali tahun 2013. (5) Kinerja pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan berdasarkan rasio pertumbuhan PAD dan Pendapatan sudah cukup baik, dimana mengalami pertumbuhan positif walaupun pertumbuhan semakin menurun setiap tahun. Pertumbuhan belanja operasi mengalami pertumbuhan positif kecuali tahun 2013 negatif. Pertumbuhan belanja operasi mengalami penurunan setiap tahunnya. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja pembangunan mengalami pertumbuhan negatif khususnya tahun 2012-2014 atau bisa dikatakan cenderung mengalami penurunan. Sehingga secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009-2015 dikategorikan cukup baik.

Saran. Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:(1) Pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih mengoptimalkan PAD yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain PAD yang sah, sehingga dapat meningkatkan kemandirian keuangan. (2)Pemerintah provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun target PAD sebaiknya mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya sehingga target tahun berikutnya akan tercapai. (3) Pemerintah provinsi Sumatera Selatan lebih memprioritaskan belanja pembangunan/modal dan menekan belanja aktivitas operasi/rutin demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.(4) Pemerintah provinsi Sumatera sebaiknya mengurangi pengeluaran belanja hibah dan belanja bantuan keuangan dikarenakan tahun 2011-2015 untuk pengeluaran ini mengalami peningkatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Oesi. (2013) “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)”. *Jurusan Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya*. Tidak Dipublikasikan.
- Azhar, M. Karya Satya. (2008) “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah”. *Tesis. Program Studi Akuntansi Pascasarjana Univeritas Sumatera Utara. E-Repository*.
- Bastian, Indra. (2006) *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Borolayuk, Mesak. Menne, Firman dan Thanwain. (2016) “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. *Jurnal Riset*. Edisi II. 1 (014. Januari, 1-13.
- Dewa, I Gede Bisma dan Susanto, Hery. (2010) “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007”. *Jurnal Ganec Swara*. Edisi Khusus 4 (3), Desember.
- Efendi, David dan Wuryanti, Sri. (2011) “Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otoda Di Kabupaten Nganjuk”. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan*. Fakultas Ekonomi Unimus.
- Fidelius. (2013) “Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado”. *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado. 1 (4), 2088-2096. ISSN 2303-1174.
- Hafidh, Aula Ahmad. (2013) “Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi”. *Jurnal Penelitian Humaniora*. 18 (2). Oktober,109-120.
- Halim, Abdul. (2007) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.
- Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. (2012) *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta. Salemba Empat.
- Indrianto, Nur dan Supomo, Bambang. (2009) *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi kedua. BPFE. Yogyakarta.
- Mahbur, Palipadapalisuri dan Suriani, Seri. (2016) ”Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng (Studi Kasus Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Soppeng)”. *Jurnal Riset*. Edisi III. 2 (004),1-15.

- Mahmudi. (2011) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia Press.
- Mardiasmo. (2004) *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2012) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Muhibtari, Astriana Nabila. (2014) *Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*. Skripsi Tidak Terpublikasi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Nordiawan, Dedi. (2006) *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta. Salemba Empat.
- Pauwah, Sudirman. Saerang, Ivonne dan Mandey, Silvy. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemda Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Emba*. Volume 2. Nomor 3. ISSN 2303-1174. Halaman 001-012. September 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan.
- Pramono, Joko. (2014) Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal Among Makarti*. Volume 7. Nomor 13. Juli 2014.
- Santosa, Oldison. (2013) Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Emba*. Volume 2. Nomor 3. ISSN 2303-1174.
- Sijabat, Mentari Yosephen. Saleh, Choiruldan Wachid, Abdul. (2013) Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 2. Nomor 2. Hal. 236-242.
- Sugiyono. (2013) *Statistika Untuk Penelitian*. Cetakan keempat belas. Alfabeta. Bandung.
- Tambuwun, Evran Lexy. Pangeman, Sifrid S dan Afandi, Dhulla. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Kota Manado. *Jurnal Emba*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Volume 2. Nomor 4. Halaman 1-116. ISSN 2303-1174
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Wahyuni, Nanik. (2016) *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Jurusan Akuntansi. Tidak Dipublikasikan.